

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Kesadaran Penyandang Disabilitas Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi di Kecamatan Karangrejo)" ini ditulis oleh Erlinda Adisa Rahmatika, NIM 126103212134, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, dibimbing oleh Dr. Ahmadi Abdul Shomad F.N, M.H.

Kata Kunci: Kesadaran Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Siyasah Dusturiyah

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kurangnya kesadaran penyandang disabilitas akan Undang-Undang yang berlaku. Hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap akses pendidikan dan kesempatan bekerja. Di banyak negara, pendidikan bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya inklusif. Sekolah-sekolah di beberapa daerah masih kurang memiliki fasilitas yang mendukung. Hal ini seringkali menyebabkan anak-anak dengan disabilitas terpaksa bersekolah di sekolah khusus, yang bisa mengisolasi mereka dari teman sebaya dan menghambat perkembangan sosial mereka. Selain itu, penyandang disabilitas juga kurang melekatkan kebijakan yang sudah diundang-undangkan. Karena itu, perlunya memberikan pengertian dan perhatian khusus maupun kesadaran terhadap penyandang disabilitas untuk bisa lebih menggunakan haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana Kesadaran Penyandang Disabilitas terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karangrejo? 2) Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karangrejo?

Adapun Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menjelaskan Kesadaran Penyandang Disabilitas terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karangrejo. 2) Untuk menjelaskan Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karangrejo.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan sifat deskriptif analisis. Untuk sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan skunder, dengan sumber data primer meliputi dari hasil wawancara mendalam terhadap pihak pihak yang terlibat. Sedangkan analisisnya menggunakan teknik analisis deskriptif dengan penyajian data secara deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kesadaran penyandang disabilitas terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 masih belum merata dan menghadapi berbagai tantangan terkhusus di Kecamatan Karangrejo. Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis berada di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Dalam lingkup kecamatan ini penulis menemukan beberapa data tentang penyandang disabilitas, dengan demikian penulis memilih untuk meneliti di kecamatan tersebut serta mengumpulkan data untuk mendapatkan hasil yang diperlukan. Meskipun pemerintah telah mengesahkan undang-undang yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, implementasi dan sosialisasi yang kurang optimal menyebabkan banyak penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya memahami serta memanfaatkan hak-hak mereka. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran ini adalah kurangnya akses informasi yang inklusif dan mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Minimnya infrastruktur yang ramah disabilitas, diskriminasi sosial, serta kurangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perumusan kebijakan semakin memperburuk keadaan. 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan kebijakan yang mencerminkan tanggung jawab negara untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terjamin, sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menuntut pemerintah untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

Siyasah Dusturiyah menuntut negara untuk tidak hanya sekadar mengakui hak-hak penyandang disabilitas dalam hukum, tetapi juga bertanggung jawab dalam implementasi, sosialisasi, dan evaluasi kebijakan secara berkala. Dengan pendekatan ini, penyandang disabilitas dapat lebih memahami dan memanfaatkan hak-haknya secara optimal, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam.

ABSTRACT

Thesis entitled "Awareness of Persons with Disabilities Regarding the Implementation of Law Number 8 of 2016 Reviewed from Siyasah Dusturiyah (Study in Karangrejo District)" was written by Erlinda Adisa Rahmatika, NIM 126103212134, State Administrative Law Study Program (HTN), Sayyid Ali Rahmatullah University Tulungagung, 2025, supervised by Dr. Ahmadi Abdul Shomad F.N, M.H.

Keywords: Awareness of Persons with Disabilities, Law Number 8 of 2016, Siyasah Dusturiyah

This research is motivated by the lack of awareness of persons with disabilities regarding the applicable laws. This greatly affects access to education and employment opportunities. In many countries, education for persons with disabilities is not fully inclusive. Schools in some areas still lack supporting facilities. This often causes children with disabilities to be forced to attend special schools, which can isolate them from their peers and hinder their social development. In addition, persons with disabilities are also less aware of the policies that have been enacted. Therefore, it is necessary to provide special understanding and attention as well as awareness for persons with disabilities to be able to exercise their rights more in accordance with applicable laws.

The focus of this research is 1) How is the Awareness of Persons with Disabilities regarding the Implementation of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities in Karangrejo District? 2) How is the Review of Siyasah Dusturiyah towards Persons with Disabilities in accordance with Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities in Karangrejo District?

The objectives of this study are 1) To explain the Awareness of Persons with Disabilities towards the Implementation of Law Number 8 of 2016 Concerning Persons with Disabilities in Karangrejo District. 2) To explain the Review of Siyasah Dusturiyah towards Persons with Disabilities in accordance with Law Number 8 of 2016 Concerning Persons with Disabilities in Karangrejo District.

The research method used is empirical legal research that uses descriptive analysis. The data sources used are primary and secondary data sources, with primary data sources including the results of in-depth interviews with the parties involved. While the analysis uses descriptive analysis techniques with deductive data presentation.

The results of this study indicate that 1) Awareness of persons with disabilities towards Law Number 8 of 2016 is still uneven and faces various challenges, especially in Karangrejo District. The research location taken by the author is in Karangrejo District, Tulungagung Regency, East Java, Indonesia. In this sub-district, the author found some data on people with disabilities, thus the author chose to conduct research in the sub-district and collect data to obtain the necessary results. Although the government has passed a law that guarantees the rights of people with disabilities in various aspects of life, less than optimal implementation and socialization have resulted in many people with disabilities still not fully understanding and utilizing their rights. One of the main factors influencing this low level of awareness is the lack of access to inclusive and easily accessible information for people with disabilities, both in urban and rural areas. The lack of disability-friendly infrastructure, social discrimination, and the lack of participation of people with disabilities in the policy formulation process further worsen the situation. 2) Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities is a policy that reflects the state's responsibility to ensure that the rights of people with disabilities are guaranteed, in line with the principle of justice in Islam which requires the government to protect and ensure the welfare of all people without discrimination. Siyasah Dusturiyah requires the state not only to recognize the rights of people with disabilities in law, but also to be responsible for

implementing, socializing, and evaluating policies periodically. With this approach, people with disabilities can better understand and optimally utilize their rights, thereby creating a more just, inclusive and prosperous society in accordance with Islamic values.

خلاصة

تم كتابة الرسالة بعنوان "وعي الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتنفيذ القانون رقم 8 لعام 2016 من خلال مراجعة السياسة الدستورية (دراسة في منطقة كارانجرجو)" من قبل إيرليندا ، (HTN) ، برنامج دراسة القانون الإداري للدولة NIM 126103212134 أديسا رحمتيكا، جامعة سيد علي رحمة الله تولونج أجونج، 2025، بإشراف الدكتور أحمد عبد الشما د.

الكلمات المفتاحية: التوعية بالإعاقة، القانون رقم 8 لسنة 2016، السياسة الدستورية

يأتي هذا البحث في ضوء قلة الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالقوانين المعمول بها. ويؤثر هذا بشكل كبير على إمكانية الحصول على التعليم وفرص العمل. في العديد من البلدان، لا يزال التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة غير شامل بالكامل. ولا تزال المدارس في بعض المناطق تفتقر إلى المرافق الداعمة. ويؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى إجبار الأطفال ذوي الإعاقة على الالتحاق بمدارس خاصة، وهو ما قد يؤدي إلى عزلهم عن أقرانهم وإعاقة نموهم الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة أقل وعياً بالسياسات التي تم إقرارها. ومن ثم فإنه من الضروري توفير فهم واهتمام خاص وكذلك الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من استخدام حقوقهم بشكل أفضل وفقاً للقوانين المعمول بها.

تركز هذه الدراسة على (1) ما هو مستوى وعي الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتنفيذ القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة كارانجرجو؟ (2) كيف تتم مراجعة السياسة الدستورية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة كارانجرجو؟

أهداف هذه الدراسة هي: (1) توضيح وعي الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتنفيذ القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة كارانجرجو. (2) توضيح مراجعة السياسة الدستورية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة كارانجرجو.

المنهج المستخدم في البحث هو البحث القانوني التجريبي الذي يستخدم الطبيعة التحليلية الوصفية. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر بيانات أولية وثانوية، حيث تتضمن مصادر

البيانات الأولية نتائج المقابلات المتعمقة مع الأطراف المعنية. وفي الوقت نفسه، يستخدم التحليل تقنيات التحليل الوصفي مع عرض البيانات الاستنتاجية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن (1) الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالقانون رقم 8 لسنة 2016 لا يزال غير متكافئ ويواجه تحديات مختلفة، وخاصة في منطقة كارانجيجو. يقع مكان البحث الذي أجراه المؤلف في منطقة كارانجيجو، مقاطعة تولونجانونج، جاوة الشرقية، إندونيسيا. وفي نطاق هذه المنطقة الفرعية، وجد المؤلف بعض البيانات حول الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا اختار المؤلف إجراء البحث في هذه المنطقة الفرعية وجمع البيانات للحصول على النتائج المطلوبة. على الرغم من أن الحكومة أقرت قوانين تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة، إلا أن التنفيذ والتواصل الاجتماعي غير الأمثل يعني أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا لا يفهمون حقوقهم ولا يستفيدون منها بشكل كامل. ومن بين العوامل الرئيسية المؤثرة على هذا المستوى المنخفض من الوعي هو عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات الشاملة والتي يمكن الوصول إليها بسهولة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. ويؤدي الافتقار إلى البنية التحتية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتمييز الاجتماعي، وعدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية صياغة السياسات إلى تفاقم الوضع. (2) قانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة هو سياسة تعكس مسؤولية الدولة في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع مبدأ العدل في الإسلام الذي يتطلب من الحكومة حماية وضمان رفاهية جميع الناس دون تمييز. وتطالب السياسة الدستورية الدولة ليس فقط بالاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون، بل أيضاً أن تكون مسؤولة عن تنفيذ السياسات وتوعيتها وتقييمها بشكل دوري. ومن خلال هذا النهج، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة فهم حقوقهم بشكل أفضل والاستفادة منها على النحو الأمثل، وبالتالي خلق مجتمع أكثر عدلاً وشاملاً وازدهاراً وفقاً للقيم الإسلامية.